

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran adalah perencanaan keuangan yang telah disusun secara rinci oleh suatu organisasi untuk periode tertentu. Anggaran memiliki beberapa fungsi mulai dari alat perencanaan, alat akuntabilitas, alat pengendalian, hingga sebagai alat kebijakan ekonomi.

Pada organisasi sektor publik, anggaran berasal dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan publik seperti pembangunan dan pelayanan publik. Anggaran sektor publik dikenal dengan APBN dan APBD. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang membahas Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai rencana anggaran yang dirumuskan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya melalui peraturan daerah.

Proses penyusunan anggaran di Indonesia umumnya disebut dengan penganggaran. Penganggaran di Indonesia menerapkan sistem penyusunan bottom up. Sistem bottom up melibatkan manajer dari yang paling rendah hingga manajer atas, dalam struktur pemerintahan daerah, penganggaran melibatkan kepala daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Penganggaran yang tidak disertai dengan informasi yang cukup dapat menyebabkan perencanaan tidak maksimal dan menyebabkan terjadinya budget padding atau budgetary slack (Nurkholis & Khusaini, 2019, p. 11). OPD

bertugas merealisasikan anggaran yang telah direncanakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran (LRA) selama satu periode.

Pada laporan realisasi anggaran tersebut terdapat jumlah anggaran suatu program dan jumlah anggaran yang direalisasikan. Pada laporan keuangan atau realisasi anggaran dapat dilihat apakah realisasi anggaran sudah terserap secara baik sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya (Engkus et al., 2020).

Di dalam laporan realisasi anggaran dapat dilihat ada atau tidaknya senjangan anggaran (budgetary slack). Senjangan anggaran dapat dilihat saat anggaran telah direalisasikan. Senjangan anggaran banyak ditemukan di organisasi sektor publik di Indonesia dengan rata-rata realisasi anggaran tidak mencapai 100%. Bahkan tidak sedikit yang masih belum bisa mencapai kriteria minimum realisasi anggaran sebesar 95%, seperti yang tertera di Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.02/2017 (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2017). Berikut adalah Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran serta Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPU Kota Bandung Tahun 2020:

Tabel 1. 1
Ringkasan Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPU Kota Bandung
Tahun 2020

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	%
Pendapatan	1.035.000.000	166.875.000	83,88
Pendapatan Asli Daerah	1.035.000.000	166.875.000	83,88
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.035.000.000	166.875.000	83,88
Belanja	518.856.558.190	245.383.388.558	52,71
Belanja Tidak Langsung	46.646.117.745	40.925.703.895	12,26
Belanja Pegawai	46.646.117.745	40.925.703.895	12,26
Belanja Langsung	472.210.440.445	204.457.684.663	56,70
Belanja Barang dan Jasa	107.068.304.687	86.836.898.681	18,90
Belanja Modal	365.142.135.580	117.620.785.804	67,79
Jumlah	517.821.558.190	245.216.513.558	52,64

Sumber: Ringkasan Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPU Kota Bandung Tahun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUNAN CIJUNG DJATI
 BANDUNG
 2020

Tabel 1. 2
LRA Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota
Bandung Tahun 2020

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%
Pendapatan	166.875.000,00	167.565.000,00	100,41
Pendapatan Asli Daerah	166.875.000,00	167.565.000,00	100,41
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	166.875.000,00	167.565.000,00	100,41

Belanja	245.383.388.557,78	209.034.480.680,00	85,19
Belanja Operasi	127.762.602.754,10	112.573.865.184,00	88,11
Belanja Pegawai	40.925.704.073,18	36.312.011.357,00	88,73
Belanja Barang	86.836.898.680,92	76.261.853.827,00	87,82
Belanja Modal	117.620.785.803,68	96.460.615.496,00	82,01
Belanja Peralatan dan Mesin	2.014.244.540,00	1.956.230.650,00	97,12
Belanja Bangunan dan Gedung	194.000.000,00	0	0
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	115.407.500.653,92	94.504.384.486,00	81,89
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.040.609,76	0	0
Jumlah	245.216.513.557,78	208.866.915.680,00	85,18

Sumber: LRA Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota

Bandung Tahun 2020

Dari data di tabel 2 dapat dilihat anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 245.216.513.557,78 dan untuk anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 208.866.915.680,00 atau sekitar 85,15%. Hal ini berarti terdapat senjangan anggaran sebesar 14,85 %. Sedangkan, pada tahun 2019 realisasi anggaran mencapai angka 87,52% dengan senjangan anggaran 12,48%. Mungkin ini terjadi karena ada pengaruh dari perubahan anggaran di masa pandemi covid-19. Masalah senjangan anggaran terjadi saat target dari anggaran pendapatan memiliki jumlah anggaran yang lebih rendah dari jumlah anggaran yang sudah direalisasikan dan target dari anggaran belanja memiliki jumlah anggaran yang sudah direalisasikan.

Maka dari itu pada penelitian yang berjudul **Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Eksternal Organisasi Terhadap Senjangan Anggaran Pada**

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung ini dipilih oleh peneliti sebagai fokus dan lokus dalam kajian penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang disebabkan oleh perubahan anggaran terhadap senjangan anggaran.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya maka peneliti melakukan identifikasi masalah yaitu:

1. Realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan peningkatan jumlah senjangan anggaran. Penurunan realisasi anggaran dapat disebabkan oleh perubahan anggaran yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh ketidakpastian lingkungan eksternal organisasi terhadap senjangan anggaran?
2. Bagaimana pengaruh jumlah perubahan lingkungan terhadap senjangan anggaran?
3. Bagaimana pengaruh kecepatan perubahan lingkungan terhadap senjangan anggaran?
4. Bagaimana pengaruh ketidakpastian lingkungan eksternal organisasi terhadap senjangan anggaran?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh ketidakpastian lingkungan eksternal organisasi terhadap senjangan anggaran.
2. Untuk mengetahui seberapa pengaruh yang disebabkan oleh jumlah perubahan anggaran kepada senjangan anggaran.
3. Untuk mengetahui seberapa pengaruh yang disebabkan oleh kecepatan perubahan anggaran kepada senjangan anggaran.
4. Untuk mengetahui seberapa pengaruh yang disebabkan oleh ketidakpastian lingkungan eksternal organisasi kepada senjangan anggaran.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan bisa memberikan nilai yang positif baik secara teoritis maupun praktis.

1.5.1 Dari Segi Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjelaskan secara teoritis mengenai bagaimana pengaruh ketidakpastian lingkungan eksternal organisasi yang disebabkan oleh berbagai macam aspek terhadap senjangan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. Penjelasan teoritis tersebut diharapkan dapat berguna bagi para pegawai organisasi perangkat daerah, terutama pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung agar bisa mengurangi atau menghilangkan fenomena senjangan anggaran pada periode selanjutnya.

1.5.2 Dari Segi Praktis

Selain dari manfaat secara teoritis ada juga manfaat secara praktisnya sebagai berikut:

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi atau rujukan kepada para pegawai Organisasi Perangkat Daerah mengenai pengaruh ketidakpastian lingkungan eksternal organisasi terhadap senjangan anggaran.
- b. Diharapkan hasil penelitian bisa menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya yang meneliti di bidang yang sama.

1.6 Kerangka Pemikiran

Proses penyusunan anggaran di Indonesia umumnya disebut dengan penganggaran. Penganggaran di Indonesia menerapkan sistem penyusunan bottom up. Sistem bottom up melibatkan manajer dari yang paling rendah hingga manajer atas, dalam struktur pemerintahan daerah, penganggaran melibatkan kepala daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Penganggaran yang tidak disertai dengan informasi yang cukup dapat menyebabkan perencanaan tidak maksimal dan menyebabkan terjadinya budget padding atau budgetary slack (Nurkholis & Khusaini, 2019, p. 11).

OPD bertugas merealisasikan anggaran yang telah direncanakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran (LRA) selama satu periode. Pada laporan realisasi anggaran tersebut terdapat jumlah anggaran suatu program dan jumlah anggaran yang direalisasikan. Dari

laporan keuangan atau realisasi anggaran dapat dilihat apakah realisasi anggaran sudah terserap secara baik sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya (Engkus et al., 2020).

Dan di dalam laporan realisasi anggaran dapat dilihat ada atau tidaknya senjangan anggaran (*budgetary slack*). Senjangan anggaran dapat dilihat saat anggaran telah direalisasikan. Senjangan anggaran banyak ditemukan di organisasi sektor publik di Indonesia dengan rata-rata realisasi anggaran tidak mencapai 100%.

Menurut Sugianto (Aisyah & Susilowati, 2021), terdapat beberapa indikator senjangan anggaran. Indikator pertama adalah produktivitas, indikator kedua adalah standar dalam anggaran mudah dicapai, indikator ketiga adalah tidak tepatnya batasan-batasan yang harus diperhatikan, indikator selanjutnya adalah anggaran tidak menuntut hal khusus, adapun indikator anggaran tidak mendorong terjadinya efisiensi, dan indikator terakhir adalah target umum yang ditetapkan dalam anggaran mudah untuk dicapai.

Ada berbagai aspek yang bisa memberikan pengaruh terhadap senjangan anggaran, salah satu aspek tersebut adalah ketidakpastian lingkungan. Govindarajan (Rahim & Rahim, 2019) mengemukakan partisipasi anggaran dan senjangan anggaran berpengaruh positif dalam kondisi ketidakpastian lingkungan yang rendah, sebaliknya akan berhubungan negatif pada kondisi ketidakpastian lingkungan yang tinggi/dinamis.

Ketidakpastian yang dimaksud adalah perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi. Perubahan lingkungan yang tidak stabil dan sulit diprediksi dapat mempengaruhi kondisi organisasi. Menurut Kartika ketidakpastian lingkungan adalah bagian dari aspek yang memaksa suatu organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan (Anisa, 2018). Menurut Mulyadi (2018, p. 14) terdapat dua dimensi yang menentukan ketidakpastian lingkungan, yaitu:

1. Kecepatan perubahan, terdapat dua keadaan kecepatan perubahan. Perubahan lingkungan dinamis, dimana lingkungan sering mengalami perubahan. Perubahan lingkungan stabil, dimana lingkungan tidak sering mengalami perubahan.
2. Jumlah perubahan, pada dimensi ini lebih merujuk kepada seberapa banyak perubahan yang diakibatkan lingkungan. Perubahan lingkungan yang terjadi dalam jumlah yang banyak akan membuat ketidakpastian yang tinggi. Sebaliknya, perubahan lingkungan yang terjadi dalam jumlah yang sedikit akan membuat ketidakpastian yang rendah.

Seperti yang telah dijelaskan pada kerangka pemikiran di atas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. 1

Kerangka Pemikiran

